

JOURNAL OF EDUCATION

[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.](#)

Pendidikan Pancasila Di Persimpangan: Antara Kepentingan Politik Dan Pembentukan Karakter

Ghaisa Zahra Shofa¹, Dhea Kapril Amanda², Nanda Apridina Nurhaliza³.

¹Universitas Mataram, Mataram, Indonesia, zahrashofa077@gmail.com.

²Universitas Mataram, Mataram, Indonesia, dheaaaa4@gmail.com.

³Universitas Mataram, Mataram, Indonesia, nandaapridinanurhaliza@gmail.com.

Abstrak: Pendidikan Pancasila memiliki peran fundamental dalam membentuk karakter dan identitas kebangsaan peserta didik di Indonesia. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan pendidikan ini sering kali berada dalam pusaran tarik-menarik antara idealisme pendidikan dan kepentingan politik praktis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji secara kritis bagaimana dinamika politik memengaruhi arah dan efektivitas Pendidikan Pancasila dalam kehidupan pendidikan nasional. Kajian ini juga bermanfaat untuk memberikan perspektif baru bagi pendidik, pengambil kebijakan, dan akademisi dalam memahami tantangan serta urgensi penyegaran pendekatan Pendidikan Pancasila agar tetap relevan dan membumi. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan menganalisis berbagai sumber ilmiah dan populer yang membahas hubungan antara pendidikan, nilai, dan politik. Hasil kajian menunjukkan bahwa intervensi politik dalam penafsiran nilai serta dalam metode penyampaian materi telah mengaburkan fungsi utama Pendidikan Pancasila sebagai sarana pembentukan karakter yang utuh. Akibatnya, nilai-nilai Pancasila tidak lagi dihayati secara mendalam oleh peserta didik, melainkan hanya dipahami secara dangkal dan formalistik. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih dialogis, kontekstual, dan bebas dari kepentingan politik agar Pendidikan Pancasila dapat menjalankan perannya secara optimal dalam menciptakan warga negara yang berkarakter, kritis, dan berwawasan kebangsaan.

Kata Kunci: Pendidikan Pancasila, Politik Pendidikan, Karakter Bangsa, Kurikulum, Nilai-Nilai.

***Abstract:** Pancasila Education has a fundamental role in shaping the character and national identity of students in Indonesia. However, in practice, the implementation of this education is often in a vortex of tug-of-war between educational idealism and practical political interests. The purpose of this study is to critically examine how political dynamics influence the direction and effectiveness of Pancasila Education in national educational life. This study is also useful for providing a new perspective for educators, policy makers, and academics in understanding the challenges and urgency of refreshing the Pancasila Education approach so that it remains relevant and down-to-earth. The method used is a literature study by analyzing various scientific and popular sources that discuss the relationship between education, values, and politics. The results of the study show that political intervention in the interpretation of values and in the method of delivering material has obscured the main function of Pancasila Education as a means of forming a complete character. As a result, the values of Pancasila are no longer deeply experienced by students, but are only understood superficially and formally. Therefore, a more dialogical, contextual, and politically free approach is needed so that Pancasila Education can optimally carry out its role in creating citizens with character, criticality, and national insight.*

Keywords: Pancasila Education, Education Politics, National Character, Curriculum,

*Correspondence Address:	Zahrashofa077@gmail.com
---------------------------------	-------------------------

Article History	Received	Revised	Published
	30 May 2025	30 May 2025	30 July 2025

PENDAHULUAN | INTRODUCTION

Pancasila adalah dasar ideologis dan filosofi hidup bangsa Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila tidak hanya menjadi fondasi konstitusional, tetapi juga nilai-nilai yang harus tertanam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks pendidikan, nilai-nilai Pancasila dijadikan bagian dari kurikulum untuk membentuk karakter peserta didik agar menjadi warga negara yang bermoral, bertanggung jawab, serta menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.

Namun demikian, sejarah panjang pendidikan Pancasila menunjukkan adanya dinamika yang kompleks. Di satu sisi, Pendidikan Pancasila diharapkan mampu menanamkan nilai-nilai luhur bangsa. Di sisi lain, realitas politik yang terjadi sering kali menjadikan pendidikan ini sebagai alat legitimasi kekuasaan atau propaganda. Hal ini pernah terjadi pada masa Orde Baru, di mana Pancasila dijadikan alat untuk menanamkan kesetiaan pada penguasa melalui program Penataran P4. Alih-alih menumbuhkan kesadaran ideologis yang kritis, Pendidikan Pancasila saat itu lebih bersifat doktrinal dan top-down.

Memasuki era Reformasi, perhatian terhadap Pendidikan Pancasila sempat menurun. Beberapa kurikulum bahkan menghapus mata pelajaran ini dari pendidikan tinggi. Namun, seiring dengan meningkatnya kesadaran akan krisis moral dan karakter generasi muda, Pendidikan Pancasila kembali diintegrasikan dalam kurikulum nasional. Kendati demikian, tantangan baru muncul, seperti bagaimana mengemas materi agar lebih kontekstual dan bebas dari muatan politis yang menyimpang dari nilai-nilai hakiki Pancasila itu sendiri.

Perkembangan politik dan perubahan rezim pemerintahan juga sering memengaruhi isi dan arah Pendidikan Pancasila. Perubahan kurikulum secara berulang, pembaruan buku ajar, hingga reorientasi pendekatan pedagogis tidak jarang dilakukan secara sepihak oleh pemerintah tanpa partisipasi akademisi atau masyarakat luas. Hal ini menjadikan Pendidikan Pancasila berada pada persimpangan antara fungsi ideal pembentukan karakter dan tekanan kepentingan politik praktis.

Berdasarkan permasalahan di atas peneliti ingin membahas bagaimana “Pendidikan Pancasila di persimpangan: antara kepentingan politik dan pembentukan karakter”, oleh karena itu, tulisan ini akan membahas lebih dalam dinamika tersebut dan mencoba menjawab pertanyaan: sejauh mana Pendidikan Pancasila telah dijalankan sesuai dengan fungsi idealnya? Apakah Pendidikan Pancasila masih relevan dalam membentuk karakter mahasiswa di tengah dinamika politik nasional? Serta bagaimana seharusnya pendekatan yang digunakan agar Pendidikan Pancasila tetap menjadi instrumen penguatan nilai-nilai kebangsaan yang murni dan bebas dari kepentingan ideologis kekuasaan?

METODE | METHOD

Penelitian ini menggunakan metode Literatur. Pendekatan ini digunakan untuk menggali berbagai sumber informasi yang relevan, baik berupa buku, jurnal ilmiah, maupun artikel populer yang membahas Pendidikan Pancasila, politik pendidikan, dan pembentukan karakter dalam sistem pendidikan Indonesia. Menurut John W. Creswell (2014), seorang ahli dalam metodologi penelitian, studi literatur adalah proses yang sangat penting dalam membangun landasan teori dan kerangka konseptual dalam penelitian. Dalam bukunya *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, Creswell menekankan bahwa

melalui studi literatur, peneliti dapat memahami apa yang sudah diketahui tentang topik tertentu, serta mengidentifikasi kesenjangan yang masih ada dalam pengetahuan yang ada.

Pendekatan studi literatur adalah metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis berbagai sumber informasi tertulis yang relevan dengan topik yang sedang dibahas. Pendekatan ini tidak melibatkan pengumpulan data secara langsung dari lapangan seperti wawancara atau observasi, melainkan berfokus pada penelaahan sumber-sumber yang sudah tersedia. Sumber-sumber tersebut dapat berupa buku-buku akademik, jurnal ilmiah, artikel populer, laporan penelitian, maupun dokumen resmi yang membahas tema yang sama atau terkait. Metode ini dipilih karena sesuai untuk menggambarkan situasi secara komprehensif, tanpa perlu terjun langsung ke lapangan, namun tetap dapat menghasilkan analisis yang kritis dan mendalam terhadap dinamika Pendidikan Pancasila di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN | RESULTS AND DISCUSSION

Setelah kami melakukan penelitian menggunakan metode-metode di atas kami mendapatkan hasil yakni. Menggambarkan kondisi di mana Pendidikan Pancasila yang seharusnya menjadi pilar dalam membentuk karakter bangsa Indonesia, sering kali berada dalam tekanan dinamika politik. Pendidikan Pancasila memiliki tujuan untuk menanamkan nilai-nilai luhur seperti keadilan sosial, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta persatuan Indonesia. Namun, dalam pelaksanaannya, nilai-nilai tersebut sering kali disesuaikan atau dimanipulasi sesuai dengan kepentingan politik yang ada pada saat itu. Ini menyebabkan pendidikan Pancasila tidak selalu berfokus pada pembentukan karakter yang kuat dan integritas nasional, tetapi lebih pada keberpihakan terhadap kekuasaan politik tertentu.

Persimpangan yang digambarkan dalam judul ini menunjukkan adanya ketegangan antara dua hal yang seharusnya saling mendukung: pendidikan untuk membentuk karakter bangsa yang berpijak pada nilai-nilai Pancasila dan intervensi politik yang mencoba mengarahkan pendidikan ini untuk mendukung agenda tertentu. Akibatnya, esensi Pancasila sebagai dasar negara sering kali terkikis, dan yang lebih ditekankan adalah loyalitas terhadap kekuasaan, bukan pemahaman mendalam tentang nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Ini menciptakan dilema dalam pelaksanaan Pendidikan Pancasila, yang seharusnya menciptakan warga negara yang kritis, bertanggung jawab, dan mencintai tanah air. Berikut Pembahasan tentang judul yang kami angkat:

1. Realitas Pendidikan Pancasila dalam Praktik

Pendidikan Pancasila selama ini diposisikan sebagai instrumen strategis untuk membentuk karakter bangsa Indonesia. Di tingkat kebijakan, keberadaan mata kuliah Pendidikan Pancasila telah diatur dalam berbagai regulasi pendidikan tinggi, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, serta Peraturan Presiden dan Permendikbudristek terkait kurikulum pendidikan nasional. Namun, realitas implementasi Pendidikan Pancasila di kampus-kampus masih menghadapi tantangan serius, baik dari segi materi, pendekatan, maupun relevansi.

Salah satu temuan penting dari berbagai studi adalah bahwa pengajaran Pendidikan Pancasila cenderung tekstual, normatif, dan kurang membumi. Banyak dosen masih mengandalkan metode ceramah satu arah, tanpa memberikan ruang eksplorasi kritis atau refleksi pribadi kepada mahasiswa. Akibatnya, mahasiswa merasa bahwa mata kuliah ini tidak memiliki dampak signifikan terhadap pembentukan nilai atau orientasi sosial-politik mereka. Bahkan tidak sedikit mahasiswa yang menganggap Pendidikan Pancasila hanya sebagai formalitas administratif untuk memenuhi SKS.

Lebih jauh lagi, ada kekhawatiran bahwa materi Pendidikan Pancasila di beberapa institusi mulai terkooptasi oleh narasi politik kekuasaan. Hal ini terlihat dari penyusunan modul atau bahan ajar yang terlalu menekankan pada loyalitas terhadap pemerintah yang sedang berkuasa, alih-alih menekankan nilai-nilai universal Pancasila seperti keadilan sosial, kemanusiaan, dan kedaulatan rakyat. Dengan kata lain, Pancasila dijadikan sebagai alat justifikasi politik, bukan

sebagai nilai etik dan moral yang harus ditanamkan secara mendalam.

2. Relevansi Pendidikan Pancasila di Era Dinamika Politik

Pertanyaan mengenai relevansi Pendidikan Pancasila dalam pembentukan karakter mahasiswa semakin mengemuka ketika dinamika politik nasional menunjukkan gejala-gejala pragmatisme, korupsi, hingga pelemahan demokrasi. Dalam konteks ini, peran Pendidikan Pancasila seharusnya menjadi penyeimbang moral dan ideologis bagi generasi muda agar tidak terjebak dalam arus politik kekuasaan yang cenderung transaksional.

Namun, dalam praktiknya, tidak semua institusi pendidikan tinggi berhasil menjadikan Pendidikan Pancasila sebagai arena pembentukan kesadaran kritis dan tanggung jawab kebangsaan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yakni Tantangan pertama yang dihadapi adalah lemahnya kapasitas pendidik dalam mengintegrasikan nilai Pancasila dengan isu-isu aktual. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman dan keterampilan guru dalam mengaitkan nilai-nilai dasar negara dengan perkembangan dan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Sebagai hasilnya, materi yang diajarkan cenderung tidak relevan dengan kondisi nyata yang dihadapi oleh siswa.

Selain itu, dukungan institusional untuk inovasi dalam metode pengajaran juga masih kurang. Banyak lembaga pendidikan yang belum sepenuhnya memberikan ruang bagi para pendidik untuk bereksperimen dengan metode pembelajaran yang lebih efektif dalam menyampaikan nilai-nilai Pancasila. Hal ini seringkali disebabkan oleh keterbatasan fasilitas, pelatihan, dan kebijakan yang mendukung pengembangan profesi pendidik.

Masalah ketiga adalah minimnya kolaborasi antara kampus dan masyarakat dalam merealisasikan nilai-nilai Pancasila secara nyata. Selama ini, hubungan antara dunia pendidikan dan masyarakat seringkali terpisah, padahal kolaborasi yang erat bisa memperkuat pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Keterlibatan masyarakat dalam proses pembelajaran akan memperkaya pemahaman dan aplikasi nilai-nilai tersebut di berbagai aspek kehidupan.

Selain itu, di era digital, mahasiswa semakin terekspos pada berbagai ideologi dan wacana alternatif yang bisa jadi bertentangan dengan semangat Pancasila. Jika tidak dibekali dengan kemampuan berpikir kritis dan daya nalar kebangsaan yang kuat, mahasiswa akan mudah termakan oleh informasi yang menyesatkan atau bahkan propaganda ekstrem. Maka dari itu, Pancasila harus diajarkan dengan pendekatan yang kontekstual dan relevan, bukan dogmatis dan kaku.

3. Pancasila Antara Ideologi dan Alat Kekuasaan

Dalam konteks historis, Pancasila lahir sebagai hasil kompromi ideologis para pendiri bangsa. Ia menjadi dasar negara yang mampu mempersatukan keberagaman suku, agama, budaya, dan pandangan politik. Namun, sejarah juga mencatat bahwa Pancasila pernah dijadikan alat politik untuk mempertahankan kekuasaan, seperti pada masa Orde Baru, di mana indoktrinasi dan kontrol ideologis sangat kuat. Situasi tersebut menciptakan trauma kolektif yang membuat generasi berikutnya cenderung apatis terhadap wacana Pancasila.

Kini, ketika semangat demokrasi mulai tumbuh, ada kebutuhan mendesak untuk memulihkan makna asli Pancasila sebagai ideologi terbuka yang menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan keadaban. Pendidikan Pancasila harus menjadi sarana untuk memfasilitasi diskusi kritis, dialog antar nilai, dan pembelajaran etis yang mampu memperkuat identitas kebangsaan tanpa mengorbankan kebebasan berpikir.

Namun, di tengah dinamika politik kontemporer, risiko kooptasi tetap tinggi. Kecenderungan politisasi lembaga pendidikan, termasuk kurikulum, menjadi tantangan serius. Jika tidak diantisipasi, Pendidikan Pancasila bisa kehilangan fungsinya sebagai agen pembebasan dan hanya menjadi alat reproduksi kekuasaan yang semu.

4. Pendidikan Pancasila dalam Praktik Pembelajaran di Perguruan Tinggi

Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi secara formal telah menjadi bagian dari kurikulum

wajib sesuai dengan kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Namun, praktiknya menunjukkan variasi yang cukup mencolok antar institusi. Beberapa perguruan tinggi masih mengajarkannya sebagai mata kuliah hafalan normatif, bukan sebagai sarana refleksi kritis terhadap dinamika kebangsaan.

Dalam studi yang dilakukan oleh Pranowo (2022), ditemukan bahwa sebagian besar mahasiswa memandang Pendidikan Pancasila sebagai beban administratif ketimbang sebagai sarana pembentukan nilai. Hal ini terjadi karena metode pengajaran yang monoton, tidak kontekstual, dan minim interaksi. Padahal, pembentukan karakter mahasiswa menuntut metode pedagogi yang transformatif, dialogis, dan berorientasi pada pembentukan kesadaran sosial.

5. Relevansi Pendidikan Pancasila dalam Masyarakat Multikultural

Indonesia sebagai bangsa yang multikultural membutuhkan instrumen pendidikan yang dapat menjaga integrasi dan harmoni sosial. Dalam konteks ini, Pancasila seharusnya menjadi jangkar utama. Nilai-nilai seperti gotong royong, toleransi, dan musyawarah dalam Pancasila sangat relevan untuk menghadapi tantangan disintegrasi sosial akibat polarisasi politik, radikalisme, dan hoaks.

Namun, sayangnya, dalam banyak kasus, Pendidikan Pancasila belum sepenuhnya mampu menginternalisasi nilai-nilai ini dalam perilaku mahasiswa. Hal ini bukan semata-mata karena isi materi yang lemah, tetapi juga karena kurangnya keteladanan dari para pemimpin politik dan institusi negara yang sering justru mempertontonkan perilaku elitis, sektarian, dan antidemokrasi.

Di sisi lain, ketika mahasiswa diajak untuk mengkaji Pancasila secara kritis dan aplikatif, mereka menunjukkan antusiasme yang tinggi. Program-program seperti sekolah kebangsaan, pelatihan kepemimpinan berkarakter, dan diskusi nilai-nilai Pancasila yang kontekstual terbukti mampu membangkitkan kesadaran kritis mahasiswa. Ini menunjukkan bahwa Pancasila masih relevan dan kuat sebagai landasan karakter, asalkan dikemas dengan pendekatan yang tepat dan tidak terjebak dalam propaganda politik.

Kelemahan lain dalam pelaksanaan Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah tidak adanya integrasi antara nilai-nilai Pancasila dengan pengalaman nyata mahasiswa di kampus. Misalnya, isu diskriminasi, intoleransi, dan kekerasan seksual yang kadang terjadi di lingkungan kampus sering tidak dihubungkan dengan prinsip-prinsip Pancasila yang menekankan keadilan, kemanusiaan, dan persatuan.

6. Pancasila dan Kepentingan Politik Kekuasaan

Salah satu tantangan terbesar dalam Pendidikan Pancasila hari ini adalah bagaimana menjaganya dari politisasi yang manipulatif. Ketika Pancasila dimonopoli oleh kekuasaan untuk melegitimasi tindakan politik tertentu, maka nilai-nilainya kehilangan makna sebagai alat pemersatu bangsa. Fenomena ini bukan hal baru. Pada masa Orde Baru, Pancasila dijadikan alat indoktrinasi yang melahirkan ketakutan dan keseragaman berpikir.

Kini, dalam era demokrasi, ancaman serupa muncul dalam bentuk baru: Pancasila digunakan untuk membungkam kritik, mengamankan kekuasaan, atau menyerang kelompok oposisi yang berbeda pandangan. Situasi ini menyebabkan banyak kalangan, termasuk mahasiswa, menjadi skeptis terhadap makna asli dari Pancasila.

Untuk menghindari hal tersebut, Pendidikan Pancasila harus dikembalikan pada ranah etik dan pedagogis, bukan sebagai proyek ideologisasi kekuasaan. Mahasiswa harus didorong untuk menjadikan Pancasila sebagai lensa kritis dalam melihat realitas sosial-politik bangsa, bukan sekadar simbol kosong yang dibaca tanpa makna.

7. Krisis Keteladanan dan Dekadensi Moral di Kalangan Elit Politik

Salah satu tantangan mendasar yang menghambat efektivitas Pendidikan Pancasila dalam membentuk karakter generasi muda adalah krisis keteladanan yang terjadi di kalangan elit politik. Ketika para pemimpin negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, terjerat dalam kasus korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan praktik-praktik tidak etis, pesan moral dan

nilai-nilai yang diajarkan dalam Pendidikan Pancasila menjadi kontradiktif dengan realitas sosial yang dilihat langsung oleh mahasiswa dan masyarakat.

Krisis keteladanan ini menciptakan jarak antara teori yang diajarkan dan praktik yang terjadi. Mahasiswa menjadi skeptis terhadap ajaran Pancasila ketika mereka menyaksikan ketidakadilan, diskriminasi, dan penyalahgunaan kekuasaan. Dalam konteks ini, relevansi Pendidikan Pancasila menjadi dipertanyakan, terutama jika tidak disertai dengan perubahan nyata dalam tata kelola pemerintahan dan perilaku elit politik.

8. Instrumentalisasi Pancasila dalam Wacana Politik

Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi fenomena instrumentalisasi Pancasila, di mana ideologi negara digunakan sebagai alat legitimasi politik kekuasaan. Pancasila tidak lagi diposisikan sebagai milik bersama bangsa, tetapi dijadikan simbol eksklusif oleh kelompok tertentu untuk menyerang pihak lain yang berbeda pandangan. Fenomena ini dapat dilihat dari maraknya narasi pelabelan anti-Pancasila terhadap kelompok yang kritis terhadap pemerintah, padahal sikap kritis merupakan bagian dari ekspresi demokrasi yang juga dijamin oleh Pancasila itu sendiri.

Akibat dari fenomena ini adalah melemahnya independensi Pendidikan Pancasila di lembaga pendidikan tinggi. Pengajar merasa tertekan untuk menyampaikan materi yang netral, karena khawatir dianggap menyimpang dari tafsir resmi pemerintah. Hal ini membatasi ruang diskusi kritis dan dialektika yang sebenarnya merupakan bagian penting dari proses pendidikan dan pembentukan karakter mahasiswa.

9. Kurangnya Inovasi dalam Metode Pembelajaran

Meskipun muatan nilai-nilai Pancasila memiliki kedalaman filosofis yang luar biasa, sering kali metode pembelajaran yang digunakan bersifat konvensional dan tidak kontekstual. Banyak dosen masih menggunakan pendekatan ceramah satu arah, tanpa melibatkan mahasiswa dalam eksplorasi kritis atau pengalaman langsung yang relevan dengan kehidupan sosial dan politik saat ini. Akibatnya, Pendidikan Pancasila cenderung dianggap membosankan dan tidak menyentuh kebutuhan mahasiswa sebagai agen perubahan.

Idealnya, pembelajaran Pancasila harus bertransformasi menjadi proses dialogis yang menghubungkan nilai-nilai dasar dengan persoalan riil masyarakat, seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, isu lingkungan, hingga demokrasi digital. Selain itu, integrasi teknologi dan pendekatan berbasis proyek sosial dapat memberikan ruang bagi mahasiswa untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata.

10. Minimnya Keterlibatan Mahasiswa dalam Aktivitas Kebangsaan

Mahasiswa sebagai agen perubahan memiliki posisi strategis dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan. Namun, dewasa ini terlihat adanya penurunan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila dan kebangsaan. Banyak mahasiswa lebih terlibat dalam aktivitas pragmatis yang berorientasi pada hasil individual, seperti perlombaan akademik, start-up digital, atau konten media sosial, dibandingkan keterlibatan dalam organisasi kemahasiswaan, diskusi ideologi, atau kegiatan sosial-politik.

Fenomena ini terjadi karena beberapa alasan. Pertama, kurangnya dukungan institusional dari kampus dalam menghadirkan atmosfer akademik yang kritis dan terbuka. Kedua, narasi nasionalisme yang cenderung formalistik membuat mahasiswa merasa jauh dari konteks keseharian mereka. Ketiga, situasi politik yang sarat polarisasi membuat mahasiswa berhati-hati untuk mengekspresikan pandangan ideologisnya secara terbuka.

Tanpa partisipasi aktif mahasiswa, Pendidikan Pancasila kehilangan elemen pentingnya sebagai wahana pembentukan karakter kolektif. Mahasiswa seharusnya tidak hanya menjadi penerima materi, tetapi juga produsen nilai-nilai kebangsaan melalui tindakan nyata di masyarakat.

11. Peran Media Sosial dan Disrupsi Digital

Era digital telah membawa disrupsi dalam banyak aspek kehidupan, termasuk cara mahasiswa

memahami dan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila. Di satu sisi, media sosial dapat menjadi sarana strategis dalam menyebarkan nilai kebangsaan secara cepat dan luas. Namun, di sisi lain, platform ini juga rawan menjadi tempat penyebaran ujaran kebencian, hoaks, dan narasi-narasi ekstrem yang bertentangan dengan semangat Pancasila.

Pendidikan Pancasila harus mampu beradaptasi dengan realitas ini. Penguatan literasi digital menjadi sangat penting agar mahasiswa tidak terjebak dalam polarisasi informasi yang bisa menggoyahkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Materi pembelajaran pun perlu mengintegrasikan isu-isu terkini di media sosial agar nilai-nilai Pancasila lebih kontekstual dan tidak terkesan sebagai doktrin kuno.

Selain itu, penggunaan teknologi sebagai media pembelajaran (seperti video interaktif, podcast, forum diskusi online) dapat meningkatkan minat mahasiswa sekaligus menjadikan Pendidikan Pancasila lebih dinamis dan berdampak.

12. Tantangan Institusional dalam Implementasi Pendidikan Pancasila

Pendidikan Pancasila tidak berdiri sendiri. Keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh sistem pendidikan nasional dan kebijakan institusional yang menaunginya. Dalam praktiknya, masih banyak lembaga pendidikan tinggi yang menganggap mata kuliah ini sebagai pelengkap atau formalitas belaka, bukan sebagai instrumen transformasi karakter dan ideologi kebangsaan.

Kurikulum yang kaku, pendekatan pedagogis yang monoton, dan kurangnya kompetensi dosen dalam mengaitkan materi Pancasila dengan realitas kontemporer, menjadi kendala utama. Hal ini diperparah dengan minimnya evaluasi terhadap efektivitas pembelajaran Pendidikan Pancasila. Banyak kampus tidak memiliki indikator yang jelas untuk mengukur sejauh mana nilai-nilai Pancasila benar-benar diinternalisasi oleh mahasiswa.

Untuk menjawab tantangan ini, institusi pendidikan perlu melakukan reformasi kurikulum dan metode pembelajaran. Pendidikan Pancasila harus dirancang sebagai mata kuliah yang aplikatif, interaktif, dan reflektif, bukan sekadar hafalan nilai. Integrasi antara teori dan praktik bisa dilakukan melalui *project-based learning*, kerja sosial, diskusi lintas budaya, serta simulasi pengambilan kebijakan yang berbasis nilai Pancasila.

13. Pendidikan Pancasila Sebagai Ruang Dialog Kebangsaan

Dalam konteks dinamika sosial-politik yang semakin kompleks, Pendidikan Pancasila harus dikembalikan pada fungsinya sebagai ruang dialog kebangsaan. Artinya, mahasiswa tidak hanya mempelajari nilai-nilai Pancasila secara normatif, tetapi juga dilibatkan dalam perbincangan kritis tentang relevansi, tantangan, dan implementasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan nyata.

Ruang-ruang pembelajaran sebaiknya menjadi arena untuk membedah berbagai persoalan bangsa: dari korupsi, intoleransi, radikalisme, ketimpangan sosial, hingga krisis lingkungan dalam bingkai nilai Pancasila. Melalui pendekatan ini, Pendidikan Pancasila bisa berfungsi sebagai alat pembebasan dan pemberdayaan mahasiswa agar menjadi warga negara yang aktif, sadar politik, serta menjunjung tinggi kemanusiaan dan keadilan sosial.

Dengan menjadikan ruang kelas sebagai tempat membangun kesadaran kritis, maka nilai-nilai Pancasila tidak lagi menjadi dogma yang asing, melainkan bagian dari etika hidup sehari-hari.

14. Sinergi antara Pendidikan Pancasila dan Gerakan Mahasiswa

Pendidikan Pancasila memiliki peluang besar untuk memperkuat gerakan mahasiswa sebagai agen perubahan. Ketika nilai-nilai Pancasila dipahami bukan sekadar sebagai warisan normatif, tetapi sebagai landasan gerakan sosial-politik yang berkeadilan, maka Pendidikan Pancasila akan menemukan momentumnya sebagai alat penggerak transformasi sosial.

Sejarah mencatat bahwa mahasiswa adalah kelompok strategis dalam dinamika politik nasional. Peran mahasiswa dalam peristiwa 1966, 1998, hingga gerakan reformasi pendidikan dan antikorupsi menjadi bukti nyata kontribusi mahasiswa sebagai penjaga nurani bangsa. Oleh karena itu, sinergi antara Pendidikan Pancasila dan kesadaran kritis gerakan mahasiswa perlu diperkuat, agar nilai-nilai dasar bangsa tidak tercerabut oleh kepentingan praktis politik sesaat.

Sinergi ini bisa diwujudkan melalui berbagai aktivitas yang melibatkan mahasiswa dalam aksi nyata seperti forum diskusi publik, advokasi isu-isu kebangsaan, kampanye sosial berbasis nilai Pancasila, serta kolaborasi lintas organisasi kemahasiswaan. Ketika Pancasila menjadi narasi utama dalam ruang-ruang gerakan, maka karakter mahasiswa akan terbentuk secara alamiah sebagai pribadi yang berpikir merdeka, berintegritas, dan memiliki tanggung jawab kebangsaan.

15. Urgensi Desentralisasi Pendidikan Pancasila

Selama ini, model pembelajaran Pendidikan Pancasila cenderung bersifat sentralistik dan normatif. Materi ajar dan pendekatannya seragam, padahal dinamika sosial-budaya di berbagai daerah di Indonesia sangat beragam. Oleh karena itu, desentralisasi dalam pengembangan kurikulum dan metode Pendidikan Pancasila menjadi penting untuk mempertajam relevansi dan kedalaman pemahaman mahasiswa terhadap nilai-nilai kebangsaan.

Desentralisasi bukan berarti mengurangi makna substansial Pancasila, melainkan menyesuaikan cara penyampaian dan kontekstualisasinya dengan realitas daerah. Misalnya, bagaimana nilai gotong royong dan keadilan sosial diterapkan dalam masyarakat adat di Papua, bagaimana toleransi hidup antarumat beragama dikembangkan di Maluku, atau bagaimana masyarakat Minang menjalankan demokrasi dalam tradisi musyawarah.

Dengan pendekatan ini, mahasiswa tidak hanya memahami Pancasila sebagai konsep, tetapi juga melihat langsung wujud nyatanya dalam kehidupan masyarakat. Hal ini akan menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna dan berdampak jangka panjang dalam pembentukan karakter.

16. Mendesain Ulang Strategi Pendidikan Pancasila ke Depan

Melihat dinamika politik nasional yang sering kali memengaruhi orientasi pendidikan, maka penting untuk merancang strategi baru dalam mengimplementasikan Pendidikan Pancasila agar tetap relevan, netral secara politik, dan berorientasi pada pembentukan karakter bangsa. Strategi tersebut harus menitikberatkan pada tiga aspek utama: pendekatan transformatif, partisipatif, dan kontekstual.

Pendekatan transformatif dalam pengajaran Pancasila menuntut agar pengajaran tidak hanya sebatas menyampaikan nilai-nilai, tetapi juga menantang mahasiswa untuk menerapkannya dalam kehidupan nyata. Untuk mencapai tujuan tersebut, pendidik dapat menggunakan berbagai metode seperti studi kasus, debat, aksi sosial, atau proyek pengabdian masyarakat yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk merefleksikan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam tindakan nyata.

Selanjutnya, pendekatan partisipatif melibatkan mahasiswa secara aktif sebagai subjek pembelajaran. Dalam pendekatan ini, mahasiswa diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam dialog dua arah, forum diskusi kritis, dan bahkan dalam penyusunan modul pembelajaran yang didasarkan pada pengalaman langsung mereka. Pendekatan ini memungkinkan mahasiswa tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga berperan dalam mengembangkan materi pembelajaran yang lebih relevan dengan kondisi mereka.

Pendekatan kontekstual berfokus pada penghubungan nilai-nilai Pancasila dengan tantangan kekinian yang dihadapi masyarakat, seperti penyebaran hoaks, intoleransi, polarisasi politik, serta krisis moral di kalangan generasi muda. Pendidikan Pancasila yang menggunakan pendekatan kontekstual ini bertujuan untuk menjawab isu-isu tersebut, sehingga pendidikan tidak hanya sekedar menyampaikan teori, tetapi juga relevan dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila akan tetap terjaga dan diterapkan dalam menghadapi tantangan zaman.

Dalam rangka memahami dinamika Pendidikan Pancasila di tengah era digitalisasi dan globalisasi, penting untuk meninjau bagaimana teknologi informasi dan perkembangan media sosial turut memengaruhi cara pandang generasi muda terhadap ideologi Pancasila. Banyak mahasiswa kini mendapatkan informasi dan nilai-nilai dari berbagai sumber global yang belum tentu sejalan dengan semangat Pancasila. Hal ini menuntut pendekatan pembelajaran yang

lebih adaptif, bukan hanya bersifat indoktrinatif melainkan juga reflektif dan kritis terhadap konteks zaman. Globalisasi juga membawa pengaruh terhadap bagaimana mahasiswa mengkaji isu-isu kebangsaan. Dalam konteks ini, nilai-nilai Pancasila seperti persatuan dan keadilan sosial harus ditransformasikan menjadi praktik konkret dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan Pancasila harus mampu menyentuh aspek kehidupan riil mahasiswa, baik dalam pergaulan, kegiatan organisasi, hingga partisipasi mereka dalam kehidupan demokrasi. Oleh karena itu, pendidikan ini seharusnya tidak hanya hadir dalam ruang kelas, tetapi juga dalam dinamika sosial kemahasiswaan.

Selain itu, dalam konteks politik kampus dan nasional, mahasiswa juga dituntut untuk memiliki kesadaran kritis dalam menilai kebijakan dan dinamika kekuasaan. Pendidikan Pancasila seharusnya menjadi alat bagi mahasiswa untuk mengembangkan nalar kritis terhadap kebijakan pemerintah dan berbagai fenomena sosial-politik. Artinya, mahasiswa tidak hanya diajarkan untuk menerima nilai-nilai Pancasila secara pasif, tetapi juga aktif mengkritisi penyimpangan terhadap nilai-nilai tersebut.

Kemudian, kolaborasi antara dosen dan mahasiswa juga menjadi faktor penting dalam mewujudkan pendidikan Pancasila yang transformatif. Dosen harus memainkan peran sebagai fasilitator yang membuka ruang diskusi, refleksi, dan eksplorasi, bukan sekadar penyampai materi satu arah. Sementara itu, mahasiswa harus didorong untuk mengaitkan pembelajaran dengan realitas kehidupan berbangsa yang sedang mereka alami. Dalam hal ini, studi kasus, proyek sosial, diskusi terbuka, dan pelibatan mahasiswa dalam kegiatan sosial-politik sangat dianjurkan.

Terakhir, penguatan kurikulum Pendidikan Pancasila juga menjadi kebutuhan mendesak. Kurikulum harus disusun tidak hanya berisi teks normatif semata, tetapi juga mengintegrasikan berbagai pendekatan interdisipliner seperti sosiologi, politik, dan filsafat moral. Integrasi ini memungkinkan mahasiswa memahami Pancasila tidak hanya sebagai teori atau ideologi negara, tetapi juga sebagai etika sosial yang hidup dan terus berkembang seiring dengan dinamika masyarakat Indonesia. Dengan demikian, pendidikan ini akan memiliki daya tahan dan daya ubah yang relevan dalam menghadapi tantangan masa kini dan masa depan.

KESIMPULAN | CONCLUSION

Pendidikan Pancasila di Indonesia berada dalam posisi yang krusial dan kompleks, yakni di antara idealisme sebagai pembentuk karakter bangsa dan realitas yang sering kali terdistorsi oleh kepentingan politik praktis. Dalam sejarahnya, Pendidikan Pancasila lahir sebagai sebuah respon terhadap kebutuhan bangsa untuk memiliki landasan ideologis yang kokoh dalam membangun jati diri nasional, terutama di tengah keragaman suku, agama, ras, dan antargolongan. Namun dalam praktiknya, Pancasila tidak jarang mengalami reduksi makna akibat dominasi kekuasaan politik yang menjadikannya sebagai alat legitimasi atau instrumen pelanggeng kekuasaan, bukan sebagai instrumen pembentukan karakter bangsa yang otentik. Dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Pancasila masih sangat relevan dan dibutuhkan dalam dunia pendidikan Indonesia, terutama di kalangan mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa. Namun, untuk memastikan bahwa pendidikan ini benar-benar mampu membentuk karakter dan kesadaran kebangsaan yang utuh, maka perlu dilakukan reposisi dan revitalisasi terhadap cara penyampaian, substansi materi, serta pendekatan pedagogis yang digunakan.

Pendidikan Pancasila idealnya dijauhkan dari pendekatan dogmatis dan satu arah yang menempatkan mahasiswa sebagai objek pasif. Sebaliknya, harus ditekankan pada pendekatan dialogis, kritis, dan kontekstual yang memungkinkan mahasiswa untuk memahami nilai-nilai Pancasila dalam konteks tantangan kehidupan sosial-politik yang sedang berlangsung. Mahasiswa harus mampu menafsirkan Pancasila secara dinamis sebagai dasar untuk membangun moral publik, menyikapi perbedaan secara bijak, serta melawan praktik-praktik penyimpangan seperti korupsi, intoleransi, radikalisme, dan disintegrasi bangsa.

Di sisi lain, campur tangan politik dalam Pendidikan Pancasila juga perlu diminimalisir.

Kurikulum, materi ajar, dan pelaksanaan pendidikan harus bebas dari pengaruh ideologis sempit atau kepentingan kekuasaan sesaat. Negara, dalam hal ini, memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga netralitas dan kemurnian nilai-nilai Pancasila sebagai milik bersama bangsa Indonesia, bukan milik kelompok tertentu.

Oleh karena itu, langkah ke depan yang perlu dilakukan adalah memastikan bahwa semua pemangku kepentingan Pendidikan dari pemerintah, pendidik, hingga mahasiswa memiliki visi yang sama dalam menjaga integritas dan relevansi Pendidikan Pancasila sebagai roh dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Hanya dengan demikian, Pendidikan Pancasila dapat keluar dari persimpangan dan melaju menjadi fondasi karakter bangsa yang tangguh di tengah arus perubahan zaman yang semakin kompleks.

UCAPAN TERIMAKASIH | THANK-YOU NOTE

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak Edy Kurniawansyah selaku dosen pengampu yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berarti selama proses penelitian ini. Semoga segala bantuan yang diberikan menjadi amal kebajikan.

REFERENSI | REFERENCE

- Ahayu, A. S. (2017). *“Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)”*. Bumi Aksara.
- Alqadri, B., Kurniawansyah, E., & Fauzan, A. (2021). *Habitiasi Nilai-Nilai Karakter Sebagai Perilaku Anti Korupsi Pada Masyarakat Kajang*. *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, 8(1).
- Chandra, F., Febriani, W. P., Dkk, (2025). *“Optimalisasi Peran Pemuda dalam Pelestarian Lingkungan Hidup melalui Pembelajaran Pancasila dan Lingkungan”*. *Vox Populi: Jurnal Umum Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 32-41.
- Huda, M. C. (2018). *“Meneguhkan pancasila sebagai ideologi bernegara. Resolusi”*: *Jurnal Sosial Politik*, 1(1), 78-99.
- Jailani, S. A. P., CSA, C. M., Saputra, J. A., & SHI, M. (2022). *“Pendidikan kewarganegaraan”*. Prenada Media.
- Julmulyani, J., Hariyanto, H., Kurniawansyah, E., & Zubair, M. (2021). *Pelaksanaan pendidikan karakter melalui pembelajaran PPKn di SMP Negeri 2 Wawo*. *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, 8(2).
- Mazid, S., & Istianah, A. (2023). *“Pendidikan Kewarganegaraan: Membangun Sekolah Damai Untuk Wujudkan Lingkungan Masyarakat Aman dan Sejahtera”*. *Al-I'timid: Jurnal Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Islam*, 1(2), 181-198.
- Nurfauziyanti, F., & Bahrudin, F. A. (2022). *“Pengaruh Literasi Digital Terhadap Perkembangan Wawasan Kebangsaan Mahasiswa”*. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(3), 54-66.
- Pasaribu, M. H., Munira, S. L., & Nelwati, S. (2024). *“Landasan dan Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan di Institusi Pendidikan Tinggi”*. *Harmoni Pendidikan: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 1(3), 173-179.

- Putikadyanto, A. P. A., Wachidah, L. R., & Sari, S. Y. (2024). “*Menciptakan Generasi Peduli Lingkungan: Inovasi Ekokurikulum Berbasis Kearifan Lokal Madura di SMP Pamekasan*”. Ghancaran: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, 47-62.
- Rohyana, H., & Lala, A. (2025). “*Pendidikan Pancasila sebagai Landasan, Nilai, dan Implementasi dalam Kehidupan*”. Cahya Ghani Recovery. Ruwaidah, A. I. S., Salsabil, A. M., Safitri, A, Dkk, (2024). “*Peran Pendidikan Pancasila dalam Membentuk Generasi Muda yang Berkarakter dan Berwawasan Kebangsaan*”. Indo-MathEdu Intellectuals Journal, 5(3), 2696-2704.
- Santoso, R., Roshayanti, F., & Siswanto, J. (2021). “*Analisis literasi lingkungan siswa SMP*”. JPPS (Jurnal Penelitian Pendidikan Sains), 10(2), 1976-1982.
- Shofiyah, N., Martin, A. S. R. A., Purnamasari, Dkk. “*Peran Pendidikan Pancasila terhadap Perkembangan Karakter Anak: Systematic Literature Review*”. Jurnal Dunia Pendidikan, 5(5), 1798-1807.
- Susanna, S., Usman, J., & Suyanta, S. (2023). *Guru di persimpangan kurikulum baru: Dilema implementasi kurikulum merdeka berbasis keislaman*. Fitrah: Journal of Islamic Education, 4(2), 356-369.
- Sutrisman, D. (2019). “*Pendidikan politik, persepsi, kepemimpinan, dan mahasiswa*”. Guepedia.
- Yuniarto, B. (2021). *Wawasan Kebangsaan*. Deepublish.